

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN APRIL TAHUN 2025**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab i. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	10
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	10
B. Tugas Pokok.	10
C. Fungsi.	10
D. Manajemen Kepaniteraan.	11
Struktur Organisasi.	11
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	12
E. Manajemen Kesekretariatan	18
1. Struktur Organisasi.	18
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	19
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	33
A. Kesimpulan.	33
B. Rekomendasi.	33
LAMPIRAN	34
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	35
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	38
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	41
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	44
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	47

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	6
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	7
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	8
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	15
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	17
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNBP Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	22
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	22
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	23
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	24
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	28
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	30
Tabel 28.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30
Tabel 29.	Rekapitulasi kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan April secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sederhana, cepat, berbiaya ringan serta transparan yang berbasis Teknologi Informasi kepada pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pengadilan yang berintegrasi, bertanggung jawab dan cakap.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi melalui pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan

dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perilaku yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara .Jayapura. Papua telah dimekarkan menjadi empat provinsi baru yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Papua Barat juga telah dimekarkan menjadi Papua Barat Daya. Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Nomor 15 Tahun 2022, dan Nomor 16 Tahun 2022. Pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Sehingga wilayah hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menjadi:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 15 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	Drs. YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009
8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – 2024
15	MERNA CINTHIA, S.H.,M.H	Periode 2024 – Sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

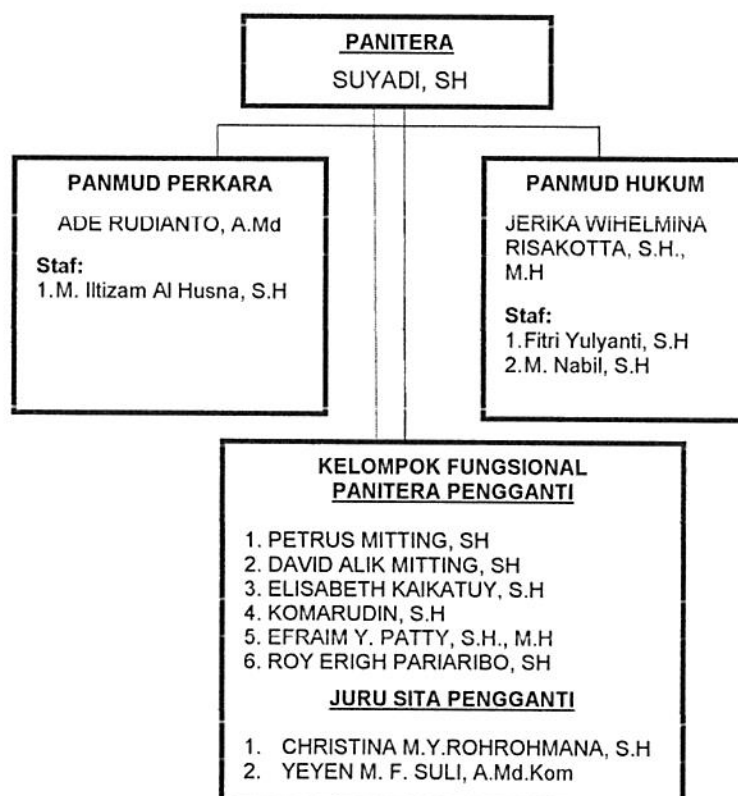
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan April Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan April Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	18	4	5	17	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi					-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan April Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	2	-	2
2	Kepegawaian	-	-	-
3	Perijinan	2	2	4
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	14	2	16
Total		18	4	22

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan April Tahun 2025

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	22,566,000	-	-	22,566,000
2	Penerimaan	-	8,095,000	-	8,095,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	625,000	625,000
4	Biaya Panggilan	-	-	549,000	549,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	40,000	40,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	500,000	500,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	500,000	500,000
9	Materai	-	-	60,000	60,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	340,000	340,000
	b. Redaksi	-	-	60,000	60,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	827,000	827,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,717,000	1,717,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	22,566,000	8,095,500	5,218,000	25,443,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan April Tahun 2025

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	6,160,500	-	-	6,160,500
2	Penerimaan	-	625,000	-	625,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	1,227,000	1,227,000
	Jumlah	6,160,500	625,000	1,227,000	5,558,500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan April Tahun 2025

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,175,000	-	-	1,175,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
4	Materai	-	-	-	-
5	Biaya Surat Panggilan	-	-	96,000	96,000
6	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
7	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
8	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
9	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
10	Pengembalian Sisa Panjar	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,175,000	500,000	96,000	1,579,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.2.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan April Tahun 2025 adalah 52.27%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan April Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 126/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/110/OT.01.3/I/2023 tentang Standar Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan. Untuk Bulan April 2025.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBJEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
	Pihak	08/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 19/G/2025/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Budi Cahyono	11/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 05/G/2025/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Astuti Supri	14/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 20/G/2022/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Agustinus, S.H., M.H	17/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Yulius Dominggus	22/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Loth Kuweb	22/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Lince Metelda Urus	22/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Pihak	23/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Pihak	23/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan

	Cenaidja	25/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Syane Florince	29-04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 22/G/2023/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Pihak	30/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	BMRIIDJA	30/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 18/G/2025/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Albert Sahat	30/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Cenaidja	30/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Cenaidja	30/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Cenaidja	30/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
	Cenaidja	30/04/2025	Salinan Putusan Perkara Nomor 32/G/2024/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan April 2025.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Drs. pabeno badu lambaran	Konsultasi hukum terkait sertifikat atas tanah masyarakat adat	1 Jam	-
2	Yusak samonsabra	Konsultasi hukum terkait sertifikat tanah	1 Jam	-
3	Abdul hamid toffir	Konsultasi hukum terkait DPRK mekanisme pengangkatan	1 Jam	-
4	Sugianto	Konsultasi hukum terkait sertifikat tanah	1 Jam	-
5	La ode sam	Konsultasi hukum terkait sertifikat tanah, memiliki 2 nama kepemilikan	1 Jam	-
6	Younce tuuk	Konsultasi hukum terkait sertifikat tanah	1 Jam	-

7	Yotam yarusaba	Konsultasi hukum terkait tanah adat	1 Jam	-
8	Kristiwipa mario	Konsultasi hukum terkait penyerobotan tanah	1 Jam	-
9	baharuddin	Konsultasi hukum terkait penyerobotan tanah	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

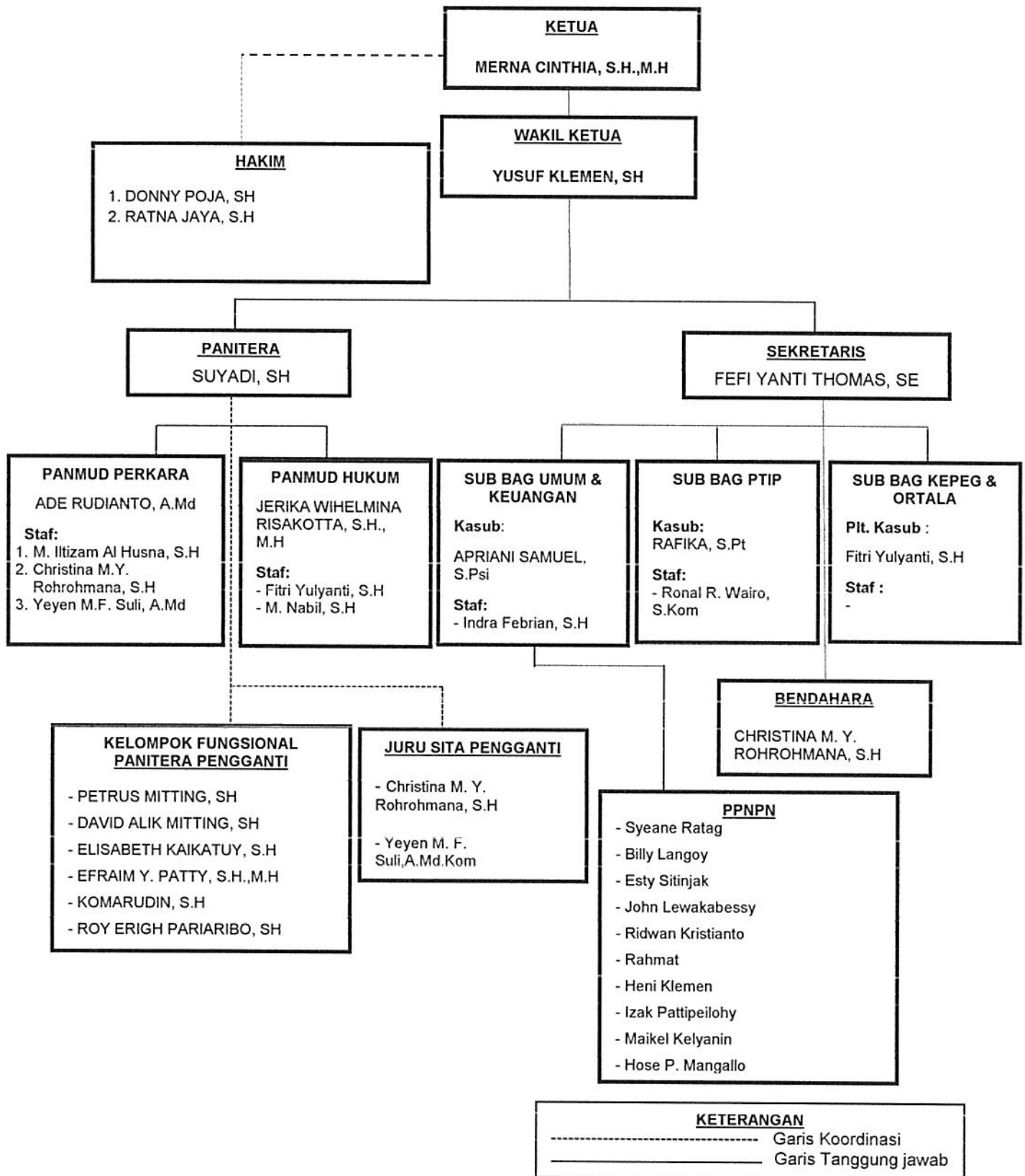
Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
(Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan April Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2025 sampai dengan bulan April Tahun 2025.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,678,479,000
Belanja Barang	1,960,220,000
Belanja Modal	1,690,003,000
Total	7,328,702,000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2025 sampai dengan bulan April Tahun 2025

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 sampai Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12,000,000
Pos Bantuan Hukum	33,000,000
Prodeo	405,000
Sidang di Luar Gedung Pengadilan	42,325,000
Total	87,730,000

b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan April Tahun 2025

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3,678,479,000	284,808,321	1,410,792,898	2,267,686,102
2	Barang	1,960,220,000	78,701,655	397,041,712	1,506,278,288
3	Barang Non Operasional	-	-	-	-
4	Modal	1,690,003,000	3,963,500	103,863,500	1,586,139,500

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	87,730,000	4,400,000	10,100,000	76,130,000
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

1) Laporan PNBPN

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan April Tahun 2025 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	6,237,476
2	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1,581,789	1,581,789
3	425232	Uang Meja (Leges)	100,000	1,080,000
4	425233	Ongkos Perkara	340,000	1,570,000
5	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	708,500	6,627,500
		Total	2,730,289	17,131,765

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 2494 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 238 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992		150 m2
3	C	1992	1100 m2	120 m2
4	C	1992		120 m2
5	C	1992		120 m2
6	C	1992		120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	-	-	-
2	B	700 M2	1536/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2024	Merna Cinthia, S.H., M.H	Ketua
3	C	1100 M2	1537/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2024	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	1538/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2024	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	1533/SEK.PTUN. W8- TUN3/PL1.2.5/XII/ 2024	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	KETUA	-
2	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	1534/SEK.PTUN. W8- TUN3/PL1.2.5/XII/ 2024	YUSUF KLEMEN, SH	WAKIL KETUA	-
3	Toyota Vios	2006	PA 1810 DZ	Baik	1532/SEK.PTUN. W8- TUN3/PL1.2.5/XII/ 2024	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	-
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	1535/SEK.PTUN. W8- TUN3/PL1.2.5/XII/ 2024	SUYADI, SH	PANITERA	-
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	1527/SEK.PTUN. W8- TUN3/PL1.2.5/XII/ 2024	APRIANI SAMUEL, S.Psi	KASUB UMUM & KEUANGAN	-
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
10	Honda	2008	DS 4301 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
12	Honda	2005	PA 4732 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	1530/SEK.PTUN. W8- TUN3/PL1.2.5/XII/ 2024	FITRI YULYANTI, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	Plt. Kasub Kepegawaian dan ORTALA
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	-	-	-	-	Proses Penghapusan
16	Honda	2007	PA 4518 DZ	Baik	1631/SEK.PTUN. W8- TUN3/PL1.2.5/XII/ 2024	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	-

17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	1528/SEK.PTUN. W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2024	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	-
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	1529/SEK.PTUN. W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2024	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	-

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-	
3	Genset	1	-	-	
4	Sedan	1	-	-	
5	Mini Bus	3	-	1	
6	Sepeda Motor	8	-	9	
7	Kursi Roda	1	-	-	
8	Cermin Besar	2	-	3	
9	Rak-rak Kayu	14	1	1	
10	Lemari Besi	3	-	7	
11	Lemari Kayu	30	6	8	
12	Brankas	2	-	-	
13	CCTV	1	-	-	
14	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11	
15	Papan Pengumuman	-	1	-	
16	White Board	1	-	1	
17	LCD Projektor/Infocus	1	-	-	
18	Alat Kantor Lainnya	1	-	3	
19	Meja Kerja Kayu	57	14	50	

20	Kursi Besi	29	4	44	
21	Kursi Kayu	20	31	41	
22	Sice	5	3	12	
23	Bangku Panjang Kayu	20	7	7	
24	Meja komputer	-	1	3	
25	Meja resepsionis	-	1	-	
26	Sketsel	2	-	-	
27	Kursi Fiber Glass	23	33	14	
28	Sofa	1	-	-	
29	AC Split	21	-	15	
30	Mixer	2	-	1	
31	Televisi	3	-	6	
32	Amplifire	2	1	-	
33	Loudspeaker	6	-	8	
34	Compact disk player	-	1	-	
35	Tiang Bendera	4	1	1	
36	Kaca Hias	1	-	1	
37	Palu Sidang	2	-	1	
38	Lambang Instansi	1	-	-	
39	Handy Cam	1	-	-	
40	Audio Mixing Console	1	-	-	
41	Microphone/Wireless Mic	6	-	2	
42	UPS	7	-	-	
43	Microphone cable	11	-	-	
44	Camera Conference	1	-	-	
45	Kursi Dorong	1	-	-	
46	Walker Polding	2	-	-	
47	Komputer jaringan lainnya	3	-	-	
48	PC	25	4	13	
49	Laptop	8	-	-	
50	Notebook	9	6	5	
51	Printer	6	6	16	
52	scanner	2	-	2	

53	server	1	-	1	
54	router	1	-	1	
55	Rak server	1	-	-	
56	Alat Tennis Meja	-	1	-	
57	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-	
58	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-	
59	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-	
60	Pagar permanen	1	-	-	
61	Referensi	18	-	-	

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk dan atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/1423/PL.01.02/XII/2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Barang Milik Negara Dengan Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan Diatas Rp. 100.000.000 per Unitnya pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KM.6/WKN.17/KNL.02/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung. Di mana memuat tentang persetujuan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa 11 (sebelas) unit tanah dan bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. 22.475.280.544 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Penghapusan Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat telah diproses lelang dan telah ada penetapan dari KPKNL Jayapura. Sementara penghapusan yang telah berjalan menunggu surat keputusan BUA MARI untuk selanjutnya

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode April Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	1	26
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	7	22
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	1	3
4	Kepaniteraan Perkara.	5	32
5	Kepaniteraan Hukum.	1	0

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan April 2025 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 24 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
2.	Wakil Ketua	Yusuf Klemen, SH	
3.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
4.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
5.	Panitera	Suyadi, S.H	
6.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
7.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
8.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
9.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
10.	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
13.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
14.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
15.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
16.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
17.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	
18.	Juru sita Pengganti	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
19.	Juru sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
20.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
21.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yuliyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala
22.	Penata Layanan Operasional	Indra Febrian, S.H	
23.	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	Panmud Perkara
24.	CPNS	M. Nabil, S.H	Panmud Hukum

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/c
2	Wakil Ketua	Yusuf Klemen, SH	IV/b
3	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
4	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
5	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
6	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
7	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
8	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
9	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
13	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
14	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
15	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
16	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
17	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
18	Juru Sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
20	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
21	Juru Sita Pengganti	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
22	Penata Layanan Operasional	Indra Febrian, S.H	III/b
23	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	III/a
24	CPNS	M. Nabii, S.H	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja III dan Bendahara Pengeluaran
3	Yeyen M. F. Suli, A.Md	Jurusita Pengganti	Bendahara Penerimaan
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pramubakti
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pengemudi

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan April mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / NON Teknik)

Tidak Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan April yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis.

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
2	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
3	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
4	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
5	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
6	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
7	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
8	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
9	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
10	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
11	Roy Erigh Pariaribo, S.H	Lengkap	-
12	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
13	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
14	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
15	Komarudin, SH	Lengkap	-
16	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
17	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
18	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
19	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-

20	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
21	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-
22	M. Iltizam Al Husna, S.H	Lengkap	-
23	M. Nabil, S.H	Lengkap	-
24	Indra Febrian, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan April Tahun 2025 dilakukan revisi buka blokir efisiensi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 dan DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Kode Satker 539139.

2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tanggung jawab pengelolaan ada pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai SK Nomor 134/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Web admin diserahkan kepada Rafika, S.Pt selaku Kasubbag PTIP dan Ronald R. Wairo, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 500 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 300 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP, 100 Mbps untuk ruang sidang online dan 100 Mbps untuk ruang media center.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Kepegawaian Ortala. dan Sub bagian yang lainnya tidak memiliki staf pelaksana.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 15 Mei 2025

WAKIL KETUA


YUSUF KLEMEN, S.H.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

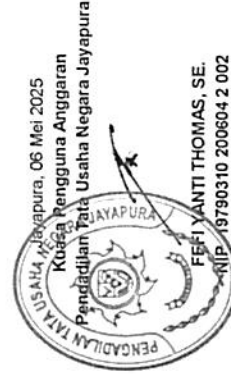
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN APRIL 2025

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2025 TANGGAL 2 DESEMBER 2024
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 09 JANUARI 2025, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 23 FEBRUARI 2025, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 10 MARET 2025, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 24 MARET 2025

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
				5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	
1	2	3	4									13
I	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung										
	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										
	1071.EBB.961	Layanan Sarana Internal										
	051	Pengadaan Kendaraan Bermotor										
	A. 532111	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	0	0		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal										
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan										
	051.0A	Pembangunan Pagar Keliling										
	A. 533131	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	1,296,368,000	99,900,000	7.71%	3,963,500	0.31%	103,863,500	8.01%	1,192,504,500	91.99%	
		JUMLAH KEGIATAN 1071.EBB	1,296,368,000	99,900,000	7.71%	3,963,500	0.31%	103,863,500	8.01%	1,192,504,500	91.99%	
	6896.EBA.962	LAYANAN UMUM										
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan										
	C. 521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pengolah Data	700,000	0	0.00%		0.00%	0	0.00%	700,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 6896.EBA.962	700,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	700,000	100.00%	
	6896.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,075,132,000	380,782,880	35.42%	96,338,020	8.96%	477,120,900	44.38%	598,011,100	55.62%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	4,384	19.06%	962	4.18%	5,346	23.24%	17,654	76.76%	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	94,297,000	27,445,220	29.11%	6,949,750	7.37%	34,394,970	36.48%	59,902,030	63.52%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36,099,000	10,085,008	27.94%	2,488,518	6.89%	12,573,526	34.83%	23,525,474	65.17%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34,160,000	9,360,000	27.40%	2,340,000	6.85%	11,700,000	34.25%	22,460,000	65.75%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	267,500,000	126,140,000	47.16%	5,310,000	1.99%	131,450,000	49.14%	136,050,000	50.86%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	174,570,000	25,424,585	14.56%	272,536	0.16%	25,697,121	14.72%	148,872,879	85.28%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	69,850,000	19,915,500	28.51%	4,924,560	7.05%	24,840,060	35.56%	45,009,940	64.44%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	187,310,000	42,652,000	22.77%	15,852,000	8.46%	58,504,000	31.23%	128,806,000	68.77%	
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	202,343,000	45,840,000	22.65%	15,280,000	7.55%	61,120,000	30.21%	141,223,000	69.79%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16,395,000	3,720,000	22.69%	930,000	5.67%	4,650,000	28.36%	11,745,000	71.64%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
T	2	3	4	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	172,800,000	28,800,000	16.67%	9,600,000	5.56%	38,400,000	22.22%	134,400,000	77.78%	
	511324	Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	168,000,000	81,515,000	48.52%	19,621,975	11.68%	101,136,975	60.20%	66,863,025	39.80%	
	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,180,000,000	324,300,000	27.48%	104,900,000	8.89%	429,200,000	36.37%	750,800,000	63.63%	
		JUMLAH KEGIATAN 6986.EBA.994.001	3,678,479,000	1,125,984,577	30.61%	284,808,321	7.74%	1,410,792,898	38.35%	2,267,686,102	61.65%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	614,604,000	139,915,000	22.77%	48,428,000	7.55%	186,343,000	30.32%	428,261,000	69.68%	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	64,472,000	35,959,000	55.77%	2,495,700	3.87%	38,454,700	59.65%	26,017,300	40.35%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	234,000,000	35,822,960	15.31%	4,321,896	1.85%	40,144,856	17.16%	193,855,144	82.84%	
	521112	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42,000,000	632,000	1.50%	1,187,500	2.83%	1,819,500	4.33%	40,180,500	95.67%	
	521113	Belanja Langganan Telepon	6,600,000	2,945,115	44.62%	476,106	7.21%	3,421,221	51.84%	3,178,779	48.16%	
	521114	Belanja Langganan Air	3,600,000	183,000	5.08%	0	0.00%	183,000	5.08%	3,417,000	94.92%	
	521141	Belanja Sewa (Web Hosting)	10,700,000	2,954,820	27.62%	1,128,453	10.55%	4,083,273	38.16%	6,616,727	61.84%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	508,634,000	1,853,000	0.36%	0	0.00%	1,853,000	0.36%	506,781,000	99.64%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,714,000	56,612,990	99.82%	0	0.00%	56,612,990	99.82%	101,010	0.18%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198,472,000	24,202,000	12.19%	6,884,000	3.47%	31,086,000	15.66%	167,386,000	84.34%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	44,504,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	44,504,000	100.00%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63,120,000	0	0.00%	15,780,000	25.00%	15,780,000	25.00%	47,340,000	75.00%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54,540,000	17,260,172	31.65%	0	0.00%	17,260,172	31.65%	37,279,828	68.35%	
	I. 524113	Transport Dalam Kota	1,360,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,360,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 6986.EBA.994.002	1,903,320,000	318,340,057	16.73%	78,701,655	4.13%	397,041,712	20.86%	1,506,278,288	79.14%	
	6986.EBD.953	LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI										
	051	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi										
	A. 521211	Bahan/Spanduk/Dokumentasi	300,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	300,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 6986.EBD.953	300,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	300,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	6,879,167,000	1,544,224,634	22.45%	367,473,476	5.34%	1,911,698,110	27.79%	4,967,468,890	72.21%	

Jumlah Anggaran	6,879,167,000	Percentase
Realisasi Anggaran	1,911,698,110	27.79%
Sisa Anggaran	4,967,468,890	72.21%



LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN APRIL 2025

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2025 TANGGAL 2 DESEMBER 2024
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.05.2.539139/2025 REVISI KE-1 TANGGAL 21 FEBRUARI 2025, SP DIPA- 005.05.2.539139/2025 REVISI KE-2 TANGGAL 21 MARET 2025

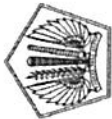
NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
I	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8= (7/4)	9= (5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	- Konsumsi Pengamanan Sidang (15 Org x 16 Kali)	12,000,000	0	0.00%	1,500,000	12.50%	1,500,000	12.50%	10,500,000	87.50%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.AEA	12,000,000	0	0.00%	1,500,000	12.50%	1,500,000	12.50%	10,500,000	87.50%	
II	1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	180,000	100.00%	
	A. 521211	- Penggandaan dan Penjiilidan Berkas Perkara	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	100.00%	
		- Alat Tulis Kantor	125,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	125,000	100.00%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	% 6=(5/4)	TOTAL	% 8=(7/4)	TOTAL	% 10=(9/4)	TOTAL	% 12=(11/4)	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4+9)	12=(11/4)	13
Jumlah KEGIATAN 1059.BCA												
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	405,000									
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	0	0.00%	500,000	11.90%	500,000	11.90%	3,700,000	88.10%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bin)	28,800,000	4,800,000	16.67%	2,400,000	8.33%	7,200,000	25.00%	21,600,000	75.00%	
Jumlah KEGIATAN 1059.QBA												
			33,000,000	4,800,000	14.55%	2,900,000	8.79%	7,700,000	23.33%	25,300,000	76.67%	
IV	1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Sidang di luar Gedung Pengadilan										
	A. 522191	- Belanja Jasa (Biaya uang kebersihan)	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	100.00%	
	524111	- Tiket (5 Org x 1 Keg)	10,765,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	10,765,000	100.00%	
		- Transportasi (5 Org x 1 PP x 1 Keg)	7,500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7,500,000	100.00%	
		- Penginapan (5 Org x 2 Hari x 1 Keg)	15,260,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	15,260,000	100.00%	
		- Uang Harian (5 Org x 3 Hari x 1 Keg)	8,700,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8,700,000	100.00%	
Jumlah KEGIATAN 1059.QCA												
			42,325,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	42,325,000	100.00%	
Jumlah KESELURUHAN												
			87,730,000	4,800,000	5.47%	4,400,000	5.02%	9,200,000	10.49%	36,205,000	41.27%	

Jumlah Anggaran	87,730,000	Percentase
Realisasi Anggaran	9,200,000	10.49%
Sisa Anggaran	78,530,000	41.27%



LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

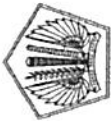


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

REKAP PNBK KEMENTERIAN

Bulan : April

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	005	MAHKAMAH AGUNG	00501	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,581,789
GRAND TOTAL									1,581,789



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran					Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI					
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak				
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	0	0	1,581,789	0	1,581,789	
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	6,237,476	0	6,237,476	
3	411618 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	35,000	0	0	0	0	0	35,000	
GRAND TOTAL		35,000	0	0	0	7,819,265	0	7,854,265	

LAMPIRAN 4
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

REKAP PNBP KEMENTERIAN

Bulan : April

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	100,000
2	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	340,000
3	005	MAHKAMAH AGUNG	00505	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	708,500
GRAND TOTAL									1,148,500



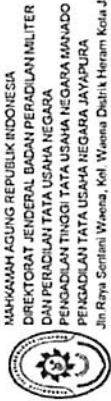
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN	BI					
			Pajak	Non Pajak				
					Pajak			
1	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	6,627,500	0		0	0	0
2	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	0	1,570,000	0	0	0	0	1,570,000
3	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000
GRAND TOTAL		0	9,277,500	0	0	0	0	9,277,500

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jin Raya Sentani Wena, Kel. Wena Distrik Heram Kota Jayapura Telp. 0967574160
E-MAIL: kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id atau www.ptun-jayapura.go.id

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN APRIL TAHUN 2025

FORMULIR U-171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No	Nomor Perkara	DISMISSAL				ACARA ENJAKAT				ACARA BIASA-CARA CEPAT						SSA ASKEH		Nomor Perkara Belum Dimutasi	KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Tanggal Pengiriman AN	Nama Ketua Panitera	Tanggal Pengiriman AN		Terima Perlwj	Tanggal Penetapan Mndari PP		Tanggal Maileis Haxmi & PP		Diluar Sdang Perlwj	Tanggal Putusan		Susunan Majelis Hakim & PP	Pemerken Persapan	Diluar Sdang Sdang	Putusan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				AN	AN		AN	AN	AN	AN		AN	AN							AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN

FORMULIR U - T1



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln Raya Sentani Waena, Kel. Waena Distrik Heram Kota Jayapura Telp. (0967) 574160
E-MAIL: kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id Situs: www.ptun-jayapura.go.id

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN APRIL TAHUN 2025

Formulir LI - T2

NO	JENIS PERKARA	PERKARA			PENGUGUT		TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						SISA PERKARA BULAN IN		Permohonan			Terima Berkas			KET.		
		MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH	DISMISSAL	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH	20	21	KASASI	BANDING	PENINJAUAN KEMBAL	EKSEKUSI	BANDING		KASASI	PENINJAUAN KEMBAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																										
1	Pertanahan	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perjinaan	2	2	-	4	-	2	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Polri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pergantian Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lain - Lain	14	2	-	16	16	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-	-	-	2	-
JUMLAH		18	4	-	22	18	2	-	22	-	-	-	-	-	2	3	-	5	17	-	1	-	-	2	2	-	-

Mengeluhi :
KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNA CINTHIA

Jayapura, 30 April 2025

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI



Formulir LI - T3

[illegible]

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNA CINTHIA

SUYADI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln Raya Sentani Waena, Kel. Waena Distrik Heram Kota Jayapura Telp. (0967) 574160
E-MAIL: kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id Situs: www.ptun-jayapura.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN APRIL 2025

Formulir LI - T4						
NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	JASA	PEMBERI JASA	BANTUAN	KETERANGAN
1	-	08-04-2025	Drs. Pabeno Badu Lambaran	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN SEJATI, Tlp. 082199812386, Jln Raya Abo Pantai Enggros Belakang Kantor Lurah Wai Mhorock, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Sertifikat atas Tanah Masyarakat Adat
2	-	09-04-2025	Yusak Samonsabra		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Sertifikat Tanah
3	-	11-04-2025	Abdul Hamid Tofir		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait DPRK mekanisme Pengangkatan
4	-	14-04-2025	Sugianto		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Sertifikat Tanah
5	-	16-04-2025	La ode Sam		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Sertifikat Tanah, memiliki 2 nama kepemilikan
6	-	17-04-2025	Youce Tuik		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Sertifikat Tanah
7	-	22-04-2025	Yotam Yarusaba		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Tanah Adat
8	-	28-04-2025	Kristwipa Mario		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Penyerobolan Tanah
9	-	30-04-2025	Baharuddin		Pemohon	Konsultasi hukum terkait Penyerobolan Tanah

Jayapura, 30 April 2025

Mengetahui:

KETUA

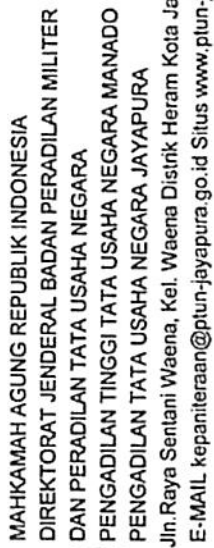
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNA CINTHIA

PANITERA

Pengadilan Tata Usaha negara

BUYADI

[illegible]

Jayapura, 30 April 2025

Mengetahui :

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNA CINTHIA



LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN APRIL TAHUN 2025

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form : LI-T6

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	22,566,000	-	-	22,566,000
2	Penerimaan	-	8,095,000	-	8,095,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	625,000	625,000
4	Biaya Panggilan	-	-	549,000	549,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	40,000	40,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	500,000	500,000
8	Biaya Pengiriman	-	-	500,000	500,000
9	Materai	-	-	60,000	60,000
10	PNBP:				
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	340,000	340,000
	b. Redaksi	-	-	60,000	60,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	827,000	827,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,717,000	1,717,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	22,566,000	8,095,000	5,218,000	25,443,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	6,160,500	-	-	6,160,500
2	Penerimaan	-	625,000	-	625,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	1,227,000	1,227,000
	Jumlah	6,160,500	625,000	1,227,000	5,558,500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,175,000	-	-	1,175,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	-	-
4	ATK Eksekusi	-	-	-	-
5	Materai	-	-	-	-
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	96,000	96,000
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	-	-
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,175,000	500,000	96,000	1,579,000

Jayapura, 30 April 2025

MENGETAHUI :
KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

MERNA CINTHIA

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI – WAENA – JAYAPURA
TELEPON/FAKSMILI (0967) 574160(PTSP) – 571216
E-MAIL kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id SITUS www.ptun-jayapura.go.id

**BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
BENDAHARA PERKARA**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima saya selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan Pemeriksaan dan Penutupan Kas Bendahara Perkara dengan keadaan sebagai berikut :

Adapun hasil penutupan kas adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A	1	Saldo Bulan Lalu	Rp	22.566.000	
	2	Jumlah Penerimaan	Rp	8.095.000	
	3	Jumlah Pengeluaran	Rp	5.218.000	
	4	Saldo Pembukuan	Rp	25.443.000	
	5	Saldo			Rp 25.443.000

II Saldo Menurut Kas , terdiri dari :

	1	Uang Tunai	Rp	4.935.100	
	2	Saldo Bank	Rp	20.507.900	
	3	Surat Berharga	Rp	-	
	4	Meterai	Rp	- (+)	
	5	Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)			Rp 25.443.000

III Hasil Pemeriksaan Kas :

A Kas Perkara Yang di Kuasai Bendahara Perkara

1	Uang Tunai di Brankas				
	Uang Kertas =	50.000 x 98 lbr	Rp	4.900.000	
		20.000 x 1 lbr	Rp	20.000	
		10.000 x 1 lbr	Rp	10.000	
		5.000 x 1 lbr	Rp	5.000	
	Uang Logam	100 x 1	Rp	100	
	Meterai	-	Rp	- (+)	
	Jumlah				Rp 4.935.100

B Uang Kas Titipan Pihak Ketiga (Eksekusi) yang ada di Brankas

1	Uang Tunai di Brankas				
	Uang Kertas =	100.000 x 15 lbr	Rp	1.500.000	
		50.000 x 1 lbr	Rp	50.000	
		20.000 x 1 lbr	Rp	20.000	
		5.000 x 1 lbr	Rp	5.000	
		2.000 x 2 lbr	Rp	4.000	
	Jumlah				Rp 1.579.000

Yang diperiksa
Kas Perkara

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Jayapura, 30 April 2025

Pemeriksa
Panitera

SUYADI, S.H.
NIP. 197205151994031002

Kepada Yth. / To :

RPL 063 PDT PTUN JAYAPURA UTK BIAYA PERK

JALAN RAYA SENTANI WAENA
Rt.001/001,Rt.001/001,KOTA JAYAPURA HERAM
KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan : 02/05/25
Statement Date

Periode Transaksi : 01/04/25 - 30/04/25
Transaction Period

No. Rekening : 214201000003307
Account No

Nama Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Valuta : IDR
Currency

Unit Kerja : KCP WAENA
Business Unit

Alamat Unit Kerja : WAENA
Business Unit Address
JAYAPURA

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
08/04/25 08:30:19	BRIVA19845493250400004NBMBPEJABAT PEMBUA BRIVA 19845493250400004NBMBPEJABA ESB:NBMB:000CD00P:825441057041	8888283	0.00	16,000.00	19,145,900.00
08/04/25 10:37:33	6038444300003129#000000005759#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM PEPALEM KEMBAREN LA 214201000003307ATM 6038444300003129	0888755	0.00	4,000,000.00	23,145,900.00
11/04/25 11:13:44	BFST214201000003307BUDI CAHYONO:BMRIIDJA 20250411BMRIIDJA01000227183990 ESB:BFST:0008N:20250411FASTIDJA01017449411	8888670	0.00	12,500.00	23,158,400.00
14/04/25 07:26:51	BFST1540014789097 CMSX:BMRIIDJA 20250414BRINIDJA01009915703846 ESB:CMSX:0008G00F:504009087647	0374891	512,500.00	0.00	22,645,900.00
14/04/25 07:26:51	BFST1540014789097 CMSX:BMRIIDJA 20250414BRINIDJA01009915703846 ESB:CMSX:0008G00F:504009087647	0374891	2,500.00	0.00	22,643,400.00
14/04/25 10:21:40	BFST214201000003307ASTUTI SUPRI:BNINIDJA 20250414BNINIDJA01000240279298 ESB:BFST:0008N:20250414FASTIDJA01077069786	8888676	0.00	20,000.00	22,663,400.00
15/04/25 08:42:48	BFST1540012631622 CMSX:BMRIIDJA 20250415BRINIDJA01009927007590 ESB:CMSX:0008G00F:504009112345	0374891	537,500.00	0.00	22,125,900.00
15/04/25 08:42:48	BFST1540012631622 CMSX:BMRIIDJA 20250415BRINIDJA01009927007590 ESB:CMSX:0008G00F:504009112345	0374891	2,500.00	0.00	22,123,400.00
17/04/25 07:41:48	BFVA19845493250400006 YOSEP TIT:BNINIDJA 20250417BNINIDJA01000213445080 ESB:BFST:0008N:2025041764148424	8888627	0.00	865,000.00	22,988,400.00
17/04/25 14:50:27	BRIVA19845493250400007NBMBAGUSTINUS SH M BRIVA 19845493250400007NBMBAGUSTI ESB:NBMB:000CD00P:829532476223	8888378	0.00	14,500.00	23,002,900.00
17/04/25 15:51:59	BFVA19845493250400009 ELVIS KRI:CENAIIDJA 20250417CENAIIDJA01000265141309 ESB:BFST:0008N:2025041726343860	8888690	0.00	865,000.00	23,867,900.00



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 3
Page 2 of 3

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
17/04/25 15:55:26	BFVA19845493250400008 ELVIS KRI:CENAIJJA 20250417CENAIJJA01000265161466 ESB:BFST:0008N:2025041726805962	8888690	0.00	865,000.00	24,732,900.00
22/04/25 14:23:22	PSP 2 Banding No 23/G/2024/PTUNJPR IFT_TO_AGUSTINUS ESB:CMSX:000L700F:2504109237199	0374907	110,000.00	0.00	24,622,900.00
22/04/25 15:54:36	BRIVA19845493250400013NBMBYULIUS DOMINGG BRIVA 19845493250400013NBMBYULIUS ESB:NBMB:000CD00P:831651075859	8888305	0.00	42,500.00	24,665,400.00
23/04/25 06:50:59	ATMLTRPRM 00058394719845493250400014 TRF PRIMA FROM	0888923	0.00	42,500.00	24,707,900.00
23/04/25 13:53:11	ATMLTRPRM 00067643019845493250400016 TRF PRIMA FROM	0888026	0.00	14,500.00	24,722,400.00
24/04/25 07:20:50	PSP 1 Perkara No 28/G/2024/PTUNJPR IFT_TO_YULIUS D TEUF SI ESB:CMSX:000L700F:2504109284561	0374019	552,000.00	0.00	24,170,400.00
25/04/25 15:18:46	BFVA19845493250400017 PT BANK C:CENAIJJA 20250425CENAIJJA01000205571065 ESB:BFST:0008N:2025042565241855	8888628	0.00	42,500.00	24,212,900.00
26/04/25 07:33:23	BRIVA19845493250400019NBMBAGUSTINUS SH M BRIVA 19845493250400019NBMBAGUSTI ESB:NBMB:000CD00P:833252828350	8888160	0.00	1,013,000.00	25,225,900.00
29/04/25 23:37:18	NBMB SYANE FLORINCE TO RPL 063 PDT PTUN ESB:NBMB:0001500F:834949201860	8888545	0.00	14,000.00	25,239,900.00
30/04/25 07:43:09	ATMLTRPRM 00034789119845493250400022 TRF PRIMA FROM	0888180	0.00	15,000.00	25,254,900.00
30/04/25 09:32:30	ESB:INDS:0002A00W:cc0f15dce50b	4920051	5,000,000.00	0.00	20,254,900.00
30/04/25 11:29:46	BFVA19845493250400023 KETUA PAN:BMRIIDJA 20250430BMRIIDJA01000220764652 ESB:BFST:0008N:2025043081449165	8888616	0.00	10,000.00	20,264,900.00
30/04/25 15:48:10	BRIVA19845493250400025NBMBALBERT SAHAT S BRIVA 19845493250400025NBMBALBERT ESB:NBMB:000CD00P:835236732714	8888569	0.00	15,000.00	20,279,900.00
30/04/25 16:17:29	BFVA19845493250400027 ANTHONIUS:CENAIJJA 20250430CENAIJJA01000235530131 ESB:BFST:0008N:2025043035119154	8888627	0.00	15,000.00	20,294,900.00
30/04/25 17:18:14	BFVA19845493250400029 ELVIS KRI:CENAIJJA 20250430CENAIJJA01000236018919 ESB:BFST:0008N:2025043047071911	8888617	0.00	71,000.00	20,365,900.00
30/04/25 21:42:24	BRIVA19845493250400026NBMBFREDERIKA KORA BRIVA 19845493250400026NBMBFREDER ESB:NBMB:000CD00P:835425881580	8888017	0.00	71,000.00	20,436,900.00
30/04/25 21:44:14	BRIVA19845493250400032NBMBFREDERIKA KORA BRIVA 19845493250400032NBMBFREDER ESB:NBMB:000CD00P:835426626585	8888598	0.00	71,000.00	20,507,900.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debit Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
-------------------------------	--	--	--------------------------------

Created By Cash Management System
05/02/2025 06:04:17 AM



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 3 dari 3
Page 3 of 3

19,129,900.00

6,717,000.00

8,095,000.00

20,507,900.00

Terbilang / In Words

DUA PULUH JUTA LIMA RATUS TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH
TWENTY MILLION FIVE HUNDRED SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

--	--

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Created By Cash Management System
05/02/2025 06:04:17 AM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN POSBAKUM
BULAN APRIL 2025

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TCL DIPA : SP DIPA-005.05.2.539139/2025 TANGGAL 2 DESEMBER 2024
NO. DIPA/ TCL DIPA REVISI : SP DIPA-005.05.2.539139/2025 REVISI KE-1 TANGGAL 21 FEBRUARI 2025, SP DIPA-005.05.2.539139/2025 REVISI KE-2 TANGGAL 21 MARET 2025

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/4	9=15+7	10=9/4	11=11/4	12=11/4	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	3.266.000	0	0.00%	500.000	15.31%	500.000	15.31%	2.766.000	84.69%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 M/g x 12 bln)	28.800.000	4.800.000	16.67%	2.400.000	8.33%	7.200.000	25.00%	21.600.000	75.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	32.066.000	4.800.000	14.97%	2.900.000	9.04%	7.700.000	24.01%	24.366.000	75.99%	

Jumlah Anggaran	32.066.000	Percentage
Realisasi Anggaran	7.700.000	24.01%
Sisa Anggaran	24.366.000	75.99%

